

PENERAPAN TAKTIK GERILYA ANTI-GERILYA BRIMOB POLRI DALAM MENGHADAPI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Seno Arya Chandra

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: senoac28@gmail.com

Abstrak

Konflik di Papua memperlihatkan karakteristik konflik asimetris yang ditandai dengan tingginya mobilitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pemanfaatan medan geografis, serta tindakan kekerasan yang berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut menuntut Korps Brimob Polri mengembangkan Taktik Gerilya Anti-Gerilya (GAG) sebagai bentuk adaptasi operasional dalam menjalankan fungsi kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi GAG oleh Korps Brimob Polri dalam menghadapi KKB di Papua serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas operasional beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Resimen II Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan telaah literatur, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GAG dilaksanakan melalui tahapan perencanaan operasi berbasis intelijen, Latihan Pra Operasi (Latpraops), mobilisasi personel, pelaksanaan operasi, serta Analisis dan Evaluasi (Anev). Penerapan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas intelijen, penguasaan medan, mobilitas operasional, koordinasi lintas unsur, dan kemampuan pengambilan keputusan taktis. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kompleksitas geografis Papua, dinamika pola serangan KKB, kesiapan logistik, kualitas perencanaan operasi, dan mekanisme pengendalian. Penelitian ini menawarkan model penguatan GAG berbasis siklus manajemen operasi yang mengintegrasikan superioritas intelijen, adaptasi medan, pembelajaran organisasi, dan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama fungsi kepolisian.

Kata Kunci: Brimob Polri, Gerilya Anti-Gerilya, Kelompok Kriminal Bersenjata, Konflik Asimetris, Papua.

Abstract

The conflict in Papua exhibits characteristics of asymmetric warfare, marked by the high mobility of Armed Criminal Groups (KKB), exploitation of challenging geographical terrain, and acts of violence that disrupt public security and order. These conditions require the Indonesian National Police Mobile Brigade Corps (Korps Brimob Polri) to adopt Guerrilla Counter-Guerrilla (GAG) tactics as an operational adaptation in carrying out policing functions. This study aims to analyze the implementation of GAG tactics by the Mobile Brigade Corps in addressing KKB in Papua and examine their contribution to strengthening Brimob's operational capacity, including the factors influencing implementation effectiveness. A qualitative case study approach was employed at the Resimen II Pasukan Pelopor of the Mobile Brigade Corps. Data were collected through interviews, observations, document analysis, and literature review, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The findings indicate that GAG implementation follows a systematic operational cycle consisting of intelligence-based operational planning, Pre-Operational Training (Latpraops),

personnel deployment, field execution, and post-operational Analysis and Evaluation (Anev). The implementation strengthens intelligence capability, terrain mastery, operational mobility, inter-agency coordination, and tactical decision-making. However, its effectiveness remains constrained by Papua's complex geography, evolving KKB attack patterns, logistical readiness, operational planning quality, and control mechanisms. This study contributes an operational strengthening model that integrates intelligence superiority, terrain adaptation, organizational learning, and civilian protection within the policing function.

Keywords: *Armed Criminal Groups, Asymmetric Conflict, Guerrilla Counter-Guerrilla, Mobile Brigade Corps, Papua.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi ancaman keamanan di Papua telah mengubah karakter tantangan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila gangguan keamanan sebelumnya lebih banyak berbentuk kriminalitas konvensional, maka dinamika keamanan Papua memperlihatkan berkembangnya pola konflik yang mengombinasikan penggunaan senjata api, mobilitas tinggi, pemanfaatan karakter geografis, serta tekanan psikologis terhadap masyarakat sipil. Pola tersebut menyebabkan pendekatan kepolisian tidak lagi cukup mengandalkan metode penegakan hukum yang bersifat statis, tetapi memerlukan kemampuan operasional yang mampu beradaptasi terhadap karakter konflik asimetris.

Secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Amanat tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan Polri sebagai institusi sipil yang menjalankan fungsi keamanan dalam negeri. Dengan demikian, penanganan KKB di Papua harus dipahami sebagai pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat, bukan sebagai pelaksanaan operasi militer dalam perspektif hukum perang internasional.

Karakter ancaman KKB memperlihatkan kesesuaian dengan konsep konflik asimetris yang dikemukakan Andrew Mack (1975), yaitu ketika kelompok dengan kapasitas relatif lebih kecil tidak berupaya memenangkan konfrontasi terbuka, tetapi mempertahankan konflik melalui mobilitas tinggi, penyergapan, pemanfaatan ruang geografis, dan tekanan psikologis terhadap lawan. Dalam konteks Papua, kelompok tersebut memanfaatkan karakter pegunungan, hutan lebat, lembah sempit, serta keterbatasan infrastruktur transportasi untuk mempertahankan ruang gerak dan mengurangi efektivitas respons aparat keamanan.

Kondisi tersebut tercermin dalam perkembangan data kekerasan di Papua selama beberapa tahun terakhir. Kajian Papua Task Force Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa jumlah insiden kekerasan meningkat dari 65 kasus pada tahun 2020 menjadi 83 kasus pada tahun 2021, sementara periode Januari 2010 hingga Maret 2022 mencatat 2.118 korban akibat berbagai bentuk kekerasan, terdiri atas 464 korban meninggal dunia dan 1.654 korban luka-luka.

Korban tersebut tidak hanya berasal dari unsur aparat keamanan, tetapi juga meliputi guru, tenaga kesehatan, pekerja sipil, tokoh masyarakat, serta warga yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perkembangan situasi keamanan setelah periode tersebut menunjukkan bahwa eskalasi ancaman belum mengalami penurunan yang signifikan. Refleksi keamanan Polda Papua mencatat bahwa sepanjang 2023 terjadi 196 aksi KKB yang menyebabkan 63 korban meninggal dunia. Pada 2024, serangan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil tetap

berlangsung pada sejumlah wilayah pegunungan, sedangkan pada 2025 tercatat 104 kasus kekerasan dengan 94 korban meninggal dunia dan 120 korban luka-luka.

Data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat sipil tetap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak konflik, sehingga orientasi perlindungan masyarakat harus menjadi pusat setiap strategi kepolisian yang diterapkan.

Dalam perspektif Counterinsurgency, David Galula (1964) menjelaskan bahwa pusat gravitasi konflik gerilya tidak terletak pada penghancuran kekuatan lawan semata, tetapi pada kemampuan negara mempertahankan kontrol terhadap wilayah dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Robert Thompson (1966) memperkuat argumentasi tersebut dengan menyatakan bahwa operasi anti-gerilya harus dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pengamanan wilayah, penguatan kehadiran negara, hingga penegakan hukum yang konsisten. Sementara itu, David Kilcullen (2006) mengembangkan konsep *population-centric conflict* yang menempatkan masyarakat sebagai elemen strategis dalam keberhasilan operasi keamanan modern. Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap atau dilumpuhkan, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan keamanan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam praktik operasional Polri, salah satu bentuk adaptasi terhadap karakter konflik tersebut diwujudkan melalui penerapan Taktik Gerilya Anti-Gerilya (GAG) oleh Korps Brimob Polri. GAG bukan merupakan konsep yang berdiri sendiri sebagai strategi keamanan nasional, melainkan seperangkat taktik operasional yang dirancang untuk menghadapi pola gerilya melalui penguatan intelijen, penguasaan medan, mobilitas tinggi, koordinasi lintas unsur, serta pengambilan keputusan yang adaptif. Oleh karena itu, posisi GAG berada pada tingkat taktik dalam kerangka strategi operasi kepolisian yang lebih luas.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji konflik Papua, masih terdapat ruang akademik yang belum banyak dibahas secara mendalam. Rohman dkk. (2024) menitikberatkan analisis pada peran Brimob berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adesmawan dkk. (2025) lebih menyoroti kinerja Satgas Damai Cartenz, sedangkan Librian dan Setyabudi (2026) menganalisis aspek perencanaan Operasi Damai Cartenz. Penelitian lain membahas strategi pengamanan Brimob, peran intelijen, maupun aspek hukum penanganan KKB. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan implementasi GAG sebagai bagian dari konteks operasi yang lebih luas, belum menjadikannya sebagai fokus utama dalam menjelaskan bagaimana taktik tersebut membentuk peningkatan kapasitas operasional organisasi.

Dengan demikian, terdapat *research gap* pada aspek hubungan antara implementasi GAG, siklus manajemen operasi kepolisian, dan peningkatan kapasitas operasional Brimob dalam menghadapi konflik asimetris di Papua. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu personel, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, mobilisasi, pengendalian, dan pembelajaran organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan analisis yang menghubungkan Teori Counterinsurgency David Galula, Teori Konflik Asimetris Andrew Mack, konsep *population-centric* David Kilcullen, serta Teori Manajemen George R. Terry dalam menjelaskan implementasi GAG sebagai model adaptasi operasional kepolisian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek hukum atau kelembagaan, penelitian ini memposisikan GAG sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan bagaimana siklus operasi yang terdiri atas Rencana Operasi (Renops), Latihan Pra Operasi (Latpraops), mobilisasi personel, pelaksanaan operasi, dan Analisis serta Evaluasi (Anev) berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas operasional Brimob.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Taktik Gerilya Anti-Gerilya oleh Korps Brimob Polri dalam menghadapi KKB

di Papua serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas operasional Brimob beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ilmu kepolisian mengenai adaptasi taktik dalam konflik asimetris, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan kapasitas operasional Korps Brimob Polri dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Taktik Gerilya Anti-Gerilya (GAG) oleh Korps Brimob Polri dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan melibatkan dinamika operasional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pengukuran kuantitatif. Sebagaimana dikemukakan Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, proses, dan interaksi yang berkembang dalam situasi nyata sehingga sesuai untuk mengkaji praktik operasional kepolisian di medan konflik.

Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu unit analisis, yaitu Resimen II Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri yang memiliki pengalaman dalam penugasan operasi pengamanan di Papua. Menurut Yin (2018), studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata melalui pemanfaatan berbagai sumber data secara simultan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kaur SDM Resimen II Pasukan Pelopor, Kaur Operasi, Paur Latihan Operasi, Danyon B Resimen II Pasukan Pelopor, serta personel peserta pelatihan GAG. Wawancara tersebut dilengkapi dengan observasi terhadap mekanisme pelatihan dan dokumentasi operasional serta telaah terhadap dokumen resmi Polri, literatur ilmiah, dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data berlangsung sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola implementasi GAG, hubungan antar-temuan, serta keterkaitannya dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kredibilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi dokumen, dan konfirmasi hasil wawancara terhadap narasumber yang relevan sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap memiliki validitas akademik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai Konteks Penerapan Taktik Gerilya Anti-Gerilya

Implementasi Taktik Gerilya Anti-Gerilya (GAG) oleh Korps Brimob Polri tidak dapat dipahami secara utuh tanpa terlebih dahulu menempatkannya dalam konteks karakter ancaman yang dihadapi di Papua. Ancaman tersebut berkembang bukan sekadar sebagai rangkaian tindak pidana biasa, tetapi sebagai gangguan keamanan berintensitas tinggi yang memiliki karakteristik konflik asimetris. Dalam kondisi demikian, keberhasilan operasi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melakukan tindakan represif terhadap pelaku kekerasan, melainkan juga oleh kemampuan organisasi kepolisian membaca pola ancaman, memahami karakter geografis wilayah, serta membangun penguasaan situasi melalui superioritas intelijen dan pengendalian ruang operasi.

Dalam perspektif teori konflik asimetris yang dikemukakan Andrew Mack (1975), kelompok yang memiliki sumber daya lebih kecil cenderung menghindari konfrontasi terbuka dengan kekuatan negara. Sebaliknya, mereka memilih mempertahankan konflik melalui mobilitas tinggi, penyeragaman, sabotase, serta pemanfaatan ruang geografis yang memberikan keuntungan taktis. Karakter tersebut secara empiris terlihat dalam pola operasi KKB di Papua yang mengutamakan serangan mendadak, perpindahan lokasi secara cepat, serta penggunaan wilayah pegunungan sebagai ruang perlindungan alami.

2. Karakter Ancaman KKB dalam Perspektif Keamanan Dalam Negeri

Secara terminologis, penelitian ini menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana digunakan dalam sistem keamanan nasional Indonesia. Penggunaan istilah tersebut penting karena berkaitan dengan dasar kewenangan institusional Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dalam negeri berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks akademik, istilah KKB perlu dibedakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). OPM merupakan organisasi politik yang sejak dekade 1960-an memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia melalui berbagai bentuk aktivitas politik maupun diplomatik. Sementara itu, TPNPB merupakan sayap bersenjata yang mengklaim diri sebagai kekuatan militer organisasi tersebut. Adapun istilah KKB digunakan aparat keamanan untuk menyebut kelompok bersenjata yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat keamanan sehingga pendekatan negara ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat, bukan sebagai hubungan antarkekuatan militer dalam hukum perang internasional.

Perbedaan terminologi tersebut memiliki implikasi yuridis yang penting. Sebagaimana menjadi salah satu catatan Prof. Karnaji dan Suparto dalam seminar proposal, penanganan KKB harus tetap diposisikan sebagai pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konstruksi bahwa negara sedang menjalankan operasi militer terhadap subjek hukum internasional. Dengan demikian, legitimasi tindakan Brimob bertumpu pada kewenangan konstitusional Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan pada paradigma peperangan antarnegara.

3. Pola Pelanggaran yang Dilakukan KKB

Data empiris hasil kajian Penulis memperlihatkan bahwa aktivitas KKB tidak hanya berupa serangan terhadap aparat keamanan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik. Kajian Papua Task Force Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa sepanjang Januari 2010 hingga Maret 2022 terjadi 2.118 korban akibat berbagai bentuk kekerasan di Papua yang terdiri atas 464 korban meninggal dunia dan 1.654 korban luka-luka.

Bentuk pelanggaran yang paling dominan meliputi penembakan terhadap aparat keamanan, pembunuhan terhadap warga sipil, penyanderaan, pembakaran fasilitas publik, perusakan infrastruktur, intimidasi terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa sasaran kekerasan tidak terbatas pada aparat keamanan, tetapi juga diarahkan kepada warga sipil sebagai bagian dari upaya menciptakan tekanan psikologis terhadap kehadiran negara.

Refleksi keamanan Polda Papua menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat 196 aksi KKB yang mengakibatkan 63 korban meninggal dunia, sementara pada tahun 2025 tercatat 104 kasus kekerasan dengan 94 korban meninggal dunia dan 120 korban luka-luka.

(tribrataneews.polri.go.id) Data tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap masyarakat tetap menjadi persoalan utama yang harus dijawab melalui pendekatan keamanan yang adaptif.

Dalam perspektif Stathis N. Kalyvas (2006), kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata dalam konflik internal sering kali bersifat selektif maupun acak untuk membangun kontrol sosial melalui rasa takut. Pola tersebut tampak dalam berbagai tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang dianggap bekerja sama dengan aparat keamanan, sehingga masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap tekanan dari kedua sisi konflik.

4. Sebaran Wilayah Operasi KKB di Papua

Karakter ancaman KKB juga ditentukan oleh distribusi geografis aktivitas kelompok tersebut. Berdasarkan berbagai laporan keamanan dan temuan penelitian, wilayah dengan intensitas gangguan keamanan relatif tinggi meliputi Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Paniai, Mimika, serta sebagian wilayah Dogiyai dan Deiyai. Wilayah-wilayah tersebut memiliki karakter geografis berupa pegunungan terjal, hutan lebat, lembah sempit, serta keterbatasan jaringan transportasi yang secara taktis memberikan keuntungan bagi kelompok bersenjata dalam melakukan mobilitas.

Sebaran wilayah tersebut menunjukkan bahwa ruang operasi KKB cenderung mengikuti koridor pegunungan tengah Papua yang memiliki akses terbatas terhadap kendaraan darat. Kondisi tersebut menyebabkan patroli kendaraan tidak selalu menjadi pilihan efektif sehingga personel Brimob harus mengembangkan kemampuan patroli berjalan kaki, navigasi darat, infiltrasi, dan penguasaan medan sebagai bagian dari implementasi GAG.

Dalam perspektif David Kilcullen (2006), konflik modern yang bersifat population-centric menuntut aparat keamanan memahami hubungan antara karakter wilayah dengan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan medan dalam operasi kepolisian bukan hanya berkaitan dengan aspek topografi, tetapi juga pemahaman terhadap jalur mobilitas masyarakat, struktur kampung, pola komunikasi lokal, dan jaringan informasi yang berkembang di wilayah operasi.

5. Struktur Kepemimpinan KKB Berdasarkan Wilayah Operasi

Karakter organisasi KKB memperlihatkan struktur yang tidak sepenuhnya tersentralisasi. Berbagai kelompok beroperasi dengan kepemimpinan wilayah yang memiliki tingkat otonomi tertentu dalam menentukan pola serangan maupun mobilitas personel. Berdasarkan berbagai laporan keamanan, beberapa figur yang selama beberapa tahun terakhir dikenal memimpin kelompok bersenjata di berbagai wilayah antara lain:

Tabel 1 Figur Kepimpinan KKB

Wilayah	Figur Kepemimpinan Yang Dikenal
Nduga	Egianus Kogoya
Puncak	Lekagak Telenggen
Puncak Jaya	Goliath Tabuni
Pegunungan Bintang	Wilayah dengan dinamika kepemimpinan yang berubah
Yahukimo	Beberapa kelompok lokal yang beroperasi secara terpisah

Pemetaan kepemimpinan tersebut memiliki arti penting dalam perencanaan operasi karena setiap kelompok memperlihatkan karakter mobilitas, pola serangan, serta hubungan sosial yang berbeda. Dalam kerangka superioritas intelijen Galula (1964), pemetaan aktor menjadi bagian dari proses memisahkan jaringan operasional kelompok dari ruang dukungan yang mereka manfaatkan di lapangan.

6. Mengapa Taktik Gerilya Harus Dijawab dengan Gerilya Anti-Gerilya

Pertanyaan mendasar yang menjadi salah satu catatan Dr. Juansi dalam seminar proposal adalah mengapa taktik gerilya harus dihadapi dengan Gerilya Anti-Gerilya, bukan dengan pendekatan operasi konvensional semata.

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan melalui integrasi teori Galula, Thompson, dan Kilcullen. Perang gerilya mengandalkan kecepatan, kejutan, fleksibilitas, dan penguasaan ruang geografis sehingga operasi konvensional yang bertumpu pada konsentrasi kekuatan dalam jumlah besar justru berpotensi kehilangan efektivitas ketika menghadapi lawan yang terus berpindah. Galula (1964) menegaskan bahwa keberhasilan counterinsurgency terletak pada kemampuan aparat memperoleh superioritas informasi sebelum memperoleh superioritas kekuatan.

Dalam konteks Brimob, GAG menjadi relevan karena memungkinkan personel mengembangkan pola patroli sektor, infiltrasi, penguasaan titik strategis, pengendalian jalur mobilitas lawan, serta respons yang cepat terhadap perubahan situasi lapangan. Dengan demikian, GAG bukan dimaksudkan untuk mengadopsi perang gerilya sebagai strategi organisasi, melainkan sebagai adaptasi taktis kepolisian agar mampu menghadapi karakter ancaman yang bergerak secara gerilya.

Analisis tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan GAG memiliki dasar rasional baik secara teoritis maupun operasional. Ancaman yang berkembang di Papua bukan sekadar persoalan kekuatan senjata, tetapi persoalan bagaimana organisasi kepolisian mampu mengintegrasikan intelijen, penguasaan medan, mobilitas, koordinasi, dan perlindungan masyarakat dalam satu siklus operasi yang adaptif. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana GAG diimplementasikan dalam tahapan operasi Brimob mulai dari perencanaan, Latihan Pra Operasi, mobilisasi personel, pelaksanaan operasi, hingga Analisis dan Evaluasi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas operasional organisasi.

7. Implementasi Taktik Gerilya Anti-Gerilya dalam Siklus Operasi Korps Brimob Polri

Implementasi Taktik Gerilya Anti-Gerilya (GAG) dalam operasi Korps Brimob Polri merupakan bagian integral dari siklus operasi kepolisian yang disusun secara sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca-operasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa GAG bukanlah strategi yang berdiri sendiri, melainkan instrumen taktis yang diterapkan untuk mendukung strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dengan demikian, efektivitas GAG tidak ditentukan semata oleh kemampuan tempur personel di lapangan, tetapi oleh keterpaduan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sebagaimana dikemukakan George R. Terry (1977).

Tahapan implementasi GAG diawali melalui penyusunan Rencana Operasi (Renops) yang menjadi fondasi seluruh aktivitas operasional. Pada tahap ini dilakukan analisis intelijen terhadap perkembangan situasi keamanan, pemetaan wilayah rawan, identifikasi pola serangan KKB, serta penentuan sektor operasi, kebutuhan personel, logistik, dan skenario kontinjensi. Dalam perspektif Galula (1964), superioritas intelijen harus diperoleh sebelum superioritas kekuatan sehingga kualitas Renops menjadi faktor yang menentukan keberhasilan operasi berikutnya. Renops juga menegaskan bahwa orientasi operasi kepolisian tetap diarahkan pada perlindungan masyarakat, bukan semata-mata penindakan terhadap pelaku.

Setelah Renops disusun, implementasi GAG memasuki tahap Latihan Pra Operasi (Latpraops) yang berfungsi mentransformasikan perencanaan menjadi kesiapan operasional personel. Latpraops tidak hanya berisi pembekalan administratif, tetapi juga simulasi patroli, infiltrasi, navigasi medan, prosedur kontak senjata, komunikasi taktis, dan mekanisme evakuasi. Pembekalan mengenai karakter sosial-budaya masyarakat Papua turut menjadi

bagian penting karena, menurut Kilcullen (2006), keberhasilan operasi population-centric sangat bergantung pada kemampuan aparat memahami lingkungan sosial tempat operasi berlangsung.

Tahap berikutnya adalah mobilisasi atau pengiriman pasukan menuju daerah operasi. Dalam siklus manajemen operasi, tahapan ini merupakan transisi antara fungsi organizing dan actuating, yaitu proses pembentukan kekuatan, distribusi perlengkapan, penyiapan dukungan logistik dan kesehatan, serta pengaturan jalur mobilisasi sesuai karakter geografis Papua. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengiriman personel tidak sekadar memindahkan pasukan, tetapi menjadi proses menjaga kesiapan operasional agar personel memasuki daerah tugas dengan kondisi yang tetap optimal.

Pelaksanaan operasi menjadi tahap implementasi nyata GAG melalui patroli sektor, penguasaan titik strategis, infiltrasi terbatas, pengumpulan intelijen lapangan, dan pengendalian jalur mobilitas KKB. Karakter pegunungan dan hutan lebat menyebabkan Brimob harus mengembangkan mobilitas tinggi, penguasaan medan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi secara cepat. Dalam perspektif Mack (1975), konflik asimetris menuntut pihak negara menyesuaikan pola operasinya terhadap lawan yang menghindari konfrontasi terbuka. Oleh karena itu, penerapan GAG menjadi relevan karena memungkinkan aparat mempertahankan inisiatif operasi tanpa kehilangan orientasi perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama fungsi kepolisian.

Tahap akhir implementasi GAG diwujudkan melalui Analisis dan Evaluasi (Anev) sebagai mekanisme controlling dalam siklus manajemen operasi. Anev tidak hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi menjadi media pembelajaran organisasi untuk mengidentifikasi perubahan pola ancaman, efektivitas taktik, kendala logistik, serta kebutuhan penyempurnaan prosedur operasi berikutnya. Proses umpan balik tersebut menunjukkan bahwa pengalaman lapangan dikonversi menjadi pengetahuan institusional yang memperkuat kapasitas adaptif Brimob dalam menghadapi dinamika ancaman KKB.

8. Kontribusi Penerapan Taktik Gerilya Anti-Gerilya terhadap Peningkatan Kapasitas Operasional Korps Brimob Polri

Penerapan Taktik Gerilya Anti-Gerilya (GAG) memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas operasional Korps Brimob Polri melalui penguatan intelijen, penguasaan medan, mobilitas operasional, koordinasi lintas unsur, dan pembelajaran organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa GAG tidak hanya meningkatkan kemampuan individu personel, tetapi juga memperkuat kemampuan organisasi dalam mengelola operasi secara adaptif menghadapi karakter konflik asimetris di Papua.

Kontribusi pertama terlihat pada penguatan kapasitas intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Informasi mengenai pola serangan, jalur mobilitas, dan perubahan situasi lapangan menjadi landasan penyusunan Rencana Operasi (Renops) sekaligus diperbarui secara berkelanjutan selama operasi berlangsung. Temuan ini sejalan dengan Galula (1964) yang menempatkan superioritas intelijen sebagai prasyarat keberhasilan counterinsurgency, sedangkan Kilcullen (2006) menegaskan bahwa operasi modern bergantung pada kemampuan memahami lingkungan operasi secara menyeluruh.

Kontribusi berikutnya adalah peningkatan penguasaan medan dan mobilitas operasional. Karakter pegunungan, hutan lebat, serta keterbatasan infrastruktur Papua menuntut Brimob mengembangkan patroli berjalan kaki, navigasi darat, infiltrasi, dan teknik survival. Dalam perspektif Mack (1975), kemampuan beradaptasi terhadap karakter geografis merupakan syarat penting bagi pihak negara ketika menghadapi kelompok bersenjata yang menghindari konfrontasi terbuka.

Implementasi GAG juga memperkuat koordinasi lintas unsur melalui integrasi Brimob dengan satuan kewilayahan Polri, unsur intelijen, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Dalam perspektif Terry (1977), koordinasi tersebut mencerminkan fungsi organizing yang memperjelas hubungan kerja, mempercepat pertukaran informasi, dan meningkatkan kualitas respons operasional.

Kontribusi terakhir muncul melalui mekanisme Analisis dan Evaluasi (Anev). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman lapangan dikonversi menjadi pembelajaran organisasi untuk menyempurnakan Renops, Latpraops, serta prosedur operasi berikutnya. Dengan demikian, Anev menjadi instrumen controlling yang memperkuat kapasitas adaptif Brimob dalam menghadapi perubahan pola ancaman KKB.

Secara keseluruhan, penerapan GAG membentuk siklus peningkatan kapasitas yang mengintegrasikan superioritas intelijen, penguasaan medan, mobilitas, koordinasi, dan pembelajaran organisasi sehingga memperkuat kemampuan Brimob menjalankan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.

9. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Taktik Gerilya Anti-Gerilya

Efektivitas penerapan GAG dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal organisasi dan faktor eksternal yang berkembang di wilayah operasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya bergantung pada kemampuan personel, tetapi juga pada kualitas perencanaan, dukungan logistik, mekanisme pengendalian, serta karakter geografis dan sosial Papua.

Faktor internal yang paling menentukan adalah kualitas Renops, Latpraops, kesiapan personel, dukungan anggaran, logistik, dan mekanisme controlling. Tahapan Latpraops berfungsi menyelaraskan pemahaman personel terhadap karakter wilayah, prosedur komunikasi, pembagian sektor, dan skenario kontinjensi sebelum memasuki daerah operasi. Pada saat yang sama, mekanisme Anev memastikan setiap pengalaman lapangan menjadi dasar penyempurnaan operasi berikutnya sehingga fungsi planning dan controlling sebagaimana dikemukakan Terry (1977) berlangsung secara berkelanjutan.

Dari sisi eksternal, karakter geografis Papua menjadi faktor dominan yang memengaruhi efektivitas operasi. Wilayah seperti Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya memiliki topografi pegunungan, hutan lebat, serta akses transportasi yang terbatas sehingga memberikan keuntungan mobilitas bagi KKB. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi Mack (1975) bahwa konflik asimetris memungkinkan pihak yang lebih kecil memanfaatkan ruang geografis untuk mengimbangi kekuatan negara.

Selain faktor geografis, dinamika pola serangan KKB juga memengaruhi efektivitas implementasi GAG. Serangan mendadak, perpindahan lokasi secara cepat, serta perubahan jalur mobilitas menyebabkan aparat harus terus memperbarui informasi intelijen. Dalam perspektif Kilcullen (2006), kemampuan mempertahankan superioritas informasi menjadi lebih penting dibanding sekadar superioritas kekuatan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah hubungan dengan masyarakat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan tokoh adat dan masyarakat berkontribusi terhadap kualitas informasi lapangan sekaligus memperkuat legitimasi kehadiran aparat. Sebaliknya, apabila hubungan sosial tidak terkelola dengan baik, ruang gerak KKB berpotensi semakin besar karena memperoleh keuntungan dari keterbatasan informasi yang dimiliki aparat.

Dengan demikian, efektivitas GAG dipengaruhi oleh interaksi antara kesiapan organisasi, kualitas manajemen operasi, karakter medan, dinamika ancaman, dan dukungan masyarakat sebagai elemen penting dalam keberhasilan operasi kepolisian di wilayah konflik.

D. KESIMPULAN

Penerapan Taktik Gerilya Anti-Gerilya (GAG) oleh Korps Brimob Polri merupakan bentuk adaptasi operasional terhadap karakter konflik asimetris di Papua yang dilaksanakan

melalui siklus operasi mulai dari Renops, Latpraops, mobilisasi personel, pelaksanaan operasi, hingga Analisis dan Evaluasi (Anev). Implementasi tersebut menunjukkan bahwa GAG merupakan instrumen taktis dalam strategi operasi kepolisian yang tetap berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai amanat konstitusional Polri.

Penerapan GAG berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas operasional Brimob melalui penguatan intelijen, penguasaan medan, mobilitas operasional, koordinasi lintas unsur, dan pembelajaran organisasi. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kualitas perencanaan operasi, kesiapan logistik dan anggaran, mekanisme controlling, kompleksitas geografis Papua, dinamika pola serangan KKB, serta dukungan masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan taktis di lapangan, tetapi oleh kemampuan organisasi mengelola seluruh siklus operasi secara adaptif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa langkah implementatif yang dapat dilakukan Polri untuk memperkuat efektivitas GAG. Pertama, memperkuat sistem intelijen operasional melalui pembaruan informasi lapangan yang terintegrasi dengan perencanaan operasi. Kedua, menyempurnakan Latpraops dengan penekanan pada penguasaan medan, navigasi, komunikasi taktis, dan pemahaman sosial-budaya Papua. Ketiga, meningkatkan kesiapan logistik dan mobilisasi personel agar operasi di wilayah pegunungan tetap berkelanjutan. Keempat, mengoptimalkan mekanisme Anev sebagai sistem pembelajaran organisasi yang menghasilkan penyempurnaan Renops dan SOP secara berkesinambungan. Kelima, memperkuat kolaborasi dengan satuan kewilayahan Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan keamanan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penguatan legitimasi negara di wilayah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustus, F. S., Andoko, D., Muniasari, M., Savitri, C. M., Nurisnaeny, P. S., & Maya, H. B. (2025). Strengthening the Papua Steering Committee strategy: Reducing instability for accelerated development in Papua, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101413.
- ANTARA News Papua. (2024). *Polda Papua Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Cartenz 2024*. Diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/4284123/polda-papua-gelar-pasukan-operasi-mantap-praja-cartenz-2024>
- ANTARA News. (2025). *Polda Papua Barat siagakan 575 personel pada Operasi Lilin 2025*. Diakses dari: <https://papatengah.antaranews.com/berita/76600/polda-papua-barat-siagakan-575-personel-pada-operasi-lilin-2025>
- Babbie, E. (2020). *The Practice of Social Research*. Cengage Learning.
- Clausewitz, C. (1976). *On War*. Princeton University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Galula, D. (1964). *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. Praeger.
- Kalyvas, S. N. (2006). *The Logic of Violence in Civil War*. Cambridge University Press.
- Kilcullen, D. (2006). Counterinsurgency redux. *Survival*, 48(4), 111–130.
- Mack, A. (1975). Why big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict. *World Politics*, 27(2), 175–200.
- Mao, Z. (1961). *On Guerrilla Warfare*. Praeger.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Terry, G. R. (1977). *Principles of Management*. Richard D. Irwin.
- Thompson, R. (1966). *Defeating Communist Insurgency: The Lessons of Malaya and Vietnam*. Chatto & Windus.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.